

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank sentral secara umum, adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan (Kebijakan Moneter) di negara tertentu. Bank Sentral juga dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai Bank Sentral adalah Bank Indonesia.

Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain bertugas mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang stabil. Sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan dapat dipengaruhi Bank Indonesia melalui kebijakan moneter. Sedangkan dari sisi penawaran yang berada diluar pengendalian Bank Indonesia, dilakukan program pemberdayaan sektor riil dan UMKM.

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 berdampak pada beberapa sektor perekonomian di banyak Negara dan Indonesia pun tidak luput dari dampak krisis tersebut. Banyak diantara perusahaan-perusahaan besar yang terkena dampak dari krisis tahun 2008, namun berbeda dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tetap bertahan menghadapi situasi tersebut.

UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena tidak memiliki utang luar negeri, tidak banyak utang perbankan karena dianggap *unbankable*, menggunakan input lokal, dan berorientasi ekspor . (Isnaini Nurrohmah, 2015 hlm 1).

Walaupun demikian, UMKM tidak terlepas dari permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu dalam produksi dan pemasaran. Dalam permasalahan produksi dinyatakan fungsi produksi $Q = f (K,L)$ K sebagai modal dan L sebagai tenaga kerja nya kurang atau tidak seimbang sehingga mempengaruhi tingkat produksinya yang kurang maksimal . Dalam teori Klasik hanya menekankan pada aspek kuantitas tenaga kerja sehingga mendapatkan kritik dari para ahli ekonomi pertumbuhan baru. Masalah tenaga kerja tersebut dihadapi oleh para pelaku UMKM yaitu tenaga kerja kurang terampil dan kurangnya pengetahuan . Kenaikan produksi UMKM membutuhkan investasi, tenaga kerja dan teknologi sehingga kenaikan produksi tersebut bisa diserap oleh pasar . Untuk meningkatkan produksi maka harus menambah tenaga kerja salah satunya melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM .

Dalam Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) yang dipelopori oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori Pertumbuhan Baru, yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan *endogen*, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan baru karena menganggap pertumbuhan GNP (

Gross National Product) lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Namun, pada teori pertumbuhan endogen mengasumsikan pengembalian modal konstan (bukan yang kian menurun) lebih bermanfaat jika modal (K) diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Tentu saja inovasi dan teknologi yang terus meningkat membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat.

Menurut Paul M. Romer yang dikutip dari salah satu jurnal tentang teori-teori baru ekonomi (Faizatun Nur Fadila, 2015) perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen yang merupakan teori pertumbuhan baru dengan model neoklasik adalah mengasumsikan bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam human capital menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang menolak kecenderungan diminishing return.

Teori tersebut terdapat pada masalah yang dihadapi oleh UMKM terutama pada inovasi dan cara untuk mengembangkan usaha tersebut. Dalam rangka mendorong pemberian Kredit dan Pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Umum, pada tahun 2015 yang ditetapkan paling rendah sebesar 5%, tahun 2016 paling rendah

sebesar 10%, tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.

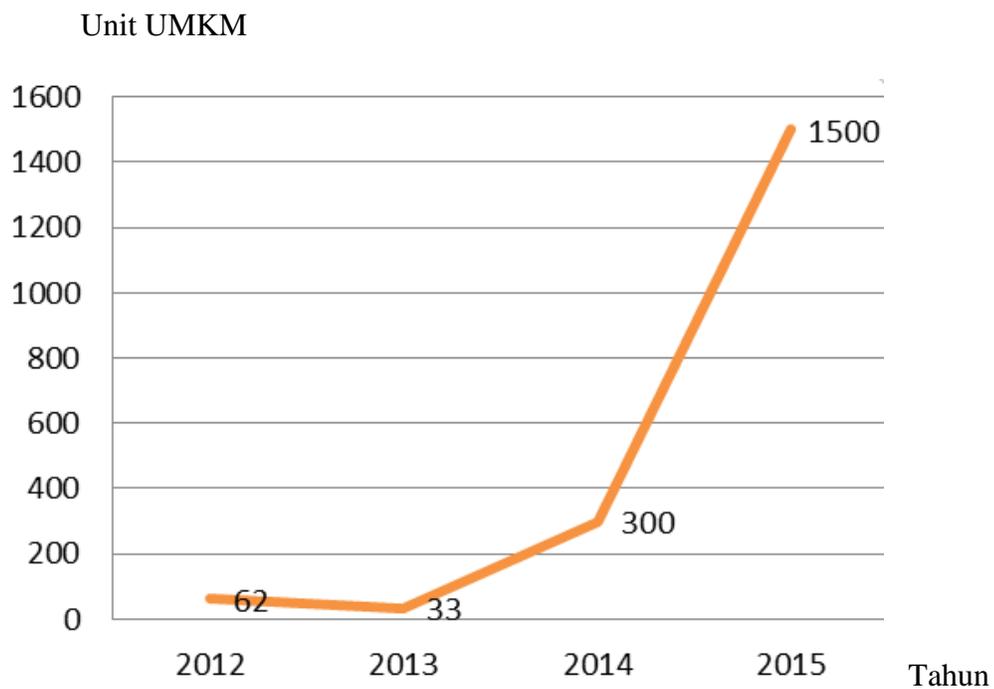
Dalam penerapannya, masih terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM.

Kebijakan peningkatan penyaluran dana perbankan kepada UMKM tersebut dilakukan antara lain melalui bauran kebijakan terkait UMKM dengan kebijakan makro prudensial mengenai giro wajib minimum berdasarkan *loan to funding ratio*, dan pemberian insentif bagi Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM.

Untuk mendukung peningkatan Kredit atau Pembiayaan UMKM tersebut, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015).

UMKM memiliki peran strategis di Indonesia baik dari sisi jumlah unit usaha, sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan investasi pada tahun 2013, jumlah unit usaha UMKM mencapai 99,99% unit

usaha di Indonesia yang menyerap 96,99% angkatan kerja, menghasilkan nilai tambah sebesar 57,56% Produk Domestik Bruto (PDB) serta 15,68% ekspor non migas. Mempertimbangkan peran strategis UMKM ini, upaya pengembangan UMKM berpotensi semakin meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Grafik 1.1 di bawah ini menunjukkan pertumbuhan jumlah UMKM Baru di Jawa Barat.



Sumber : Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, 2016

Grafik 1.1 Pertumbuhan jumlah UMKM Baru (unit) di Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.1, dapat dijelaskan bahwa di Jawa Barat dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya peminat UMKM dalam mengikuti program pengembangan UMKM yang telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari yang berjumlah 33 unit menjadi 300 unit. Hal itu disebabkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus melakukan pengembangan UMKM di Jawa Barat melalui program salah satunya Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) terutama daerah - daerah yang memiliki potensi produk unggulan. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah unit UMKM di Jawa Barat terus meningkat yang sekarang berjumlah 1500 unit.

Tabel 1.1. Perbandingan Pertumbuhan IKM Dan IB di Jawa Barat

Unit Usaha			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1).	IKM	Unit	193,123	195,465	197,134	198,478	199,537	199,720	199,822	201,455	201,997
2).	IB	Unit	3,253	3,276	3,307	3,475	3,523	3,592	3,597	3,606	4,505
Total UU			196,376	198,741	200,441	201,953	203,060	203,312	203,419	205,061	206,502
Growth (%)				1.20%	0.86%	0.75%	0.55%	0.12%	0.05%	0.81%	0.70%
Tenaga Kerja						-	-	-	-		
1).	IKM	Orang	2,088,101	2,148,684	2,206,532	2,280,375	2,291,053	2,294,825	4,571,536	4,778,819	4,796,242
2).	IB	Orang	1,806,843	1,817,950	1,830,817	1,914,235	1,925,618	1,926,460	3,839,853	3,841,235	3,980,674
Total TK			3,894,944	3,966,634	4,037,349	4,194,610	4,216,671	4,221,285	8,411,389	8,620,054	8,776,916
Growth (%)				1.84%	1.78%	3.90%	0.53%	0.11%	99.26%	2.48%	1.82%
Investasi						-	-	-	-		
1).	IKM	Rp. Juta	3,831,212.80	7,279,160.39	8,505,198.34	9,871,646.00	10,106,017.47	10,206,094.30	10,325,498.30	11,391,294.18	12,161,648.30
2).	IB	Rp. Juta	59,908,821.00	60,744,392.63	62,925,218.00	181,245,978.98	187,825,324.14	202,323,541.54	203,417,541.54	204,119,114.74	270,276,888.24
Total Investasi			63,740,033.80	68,023,553.02	71,430,416.34	191,117,624.97	197,931,341.60	212,529,635.83	213,743,039.83	215,510,408.91	282,438,536.53
Growth (%)				6.72%	5.01%	167.56%	3.57%	7.38%	0.57%	0.83%	31.06%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan pertumbuhan IKM dan IB di Jawa Barat dilihat dari Unit usaha IKM pada tahun 2013 sampai tahun 2014

mengalami penurunan yaitu sebesar 0,71 % menjadi 0,70 % , artinya IKM masih perlu dikembangkan.Sedangkan IB sebanyak 4.505 masih sedikit dibandingkan dengan IKM. Seharusnya IKM lebih sedikit dibandingkan IB.

Dalam rangka pengembangan UMKM, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (Nota Kesepahaman) yang diantaranya adalah pelaksanaan beberapa program kerjasama. Melalui pelaksanaan kerjasama diharapkan dapat diperoleh sinergi antara BI dengan kementerian/pihak lainnya dalam rangka pengembangan UMKM. Pelaksanaan kerjasama dimaksud mencakup berbagai bidang antara lain penelitian, peningkatan kapasitas (pelatihan) dan juga pertukaran informasi.

Upaya pengembangan UMKM berpotensi semakin meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Mempertimbangkan peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, Bank Indonesia (BI) melaksanakan pengembangan UMKM untuk mendorong pencapaian tugas Bank Indonesia. Peran pengembangan UMKM tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung perwujudan stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi supply, stabilitas sistem keuangan melalui terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih seimbang serta kehandalan sistem pembayaran melalui dukungan terhadap penggunaan rupiah dan pemanfaatan elektronifikasi pembayaran. Hal tersebut dilaksanakan melalui peningkatan akses keuangan dan pengembangan

UMKM khususnya dalam rangka meningkatkan kredit UMKM, yang dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan
2. Peningkatan kapasitas UMKM
3. Minimalisir kesenjangan informasi
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders

Perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan dilaksanakan antara lain melalui fasilitasi Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), sosialisasi program pencatatan transaksi keuangan, dsb. Sementara itu, program yang dilakukan untuk strategi peningkatan kapasitas UMKM yang dilaksanakan BI antara lain meliputi program pengembangan klaster ketahanan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui pasokan *volatile foods* BI juga melaksanakan program pengembangan wirausaha BI dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan struktur neraca perdagangan.

Salah satu program kerja Bank Indonesia yang dapat mengembangkan UMKM yaitu program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha yang di bina Bank Indonesia dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu materil, intelektual, waktu, dan kemampuan kretivitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain dan mencetak wirausaha tangguh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti ke dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul *“Pengaruh Program Pelatihan Wirausaha Bank Indonesia, Sarana Produksi dan Tenaga Kerja Terhadap Hasil Penjualan UMKM”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang berkenaan dengan pengembangan UMKM di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia sebelum dan setelah memperoleh bantuan dari Bank Indonesia ?
2. Apakah pelatihan program Wirausaha Bank Indonesia berpengaruh terhadap hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung?
3. Apakah sarana produksi (barang modal) berpengaruh terhadap hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung?
4. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia sebelum dan sesudah memperoleh bantuan dari Bank Indonesia ?
2. Untuk menjelaskan pengaruh pelatihan program Wirausaha Bank Indonesia berpengaruh terhadap hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung.
3. Untuk menjelaskan sarana produksi (barang modal) berpengaruh terhadap hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung.
4. Untuk menjelaskan tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil penjualan UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis/ Akademik

Adapun manfaat akademik dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan sektor perbankan dan UMKM serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya terkait dengan perkembangan UMKM.

1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.